

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab satu ini penulis akan memaparkan mengenai Pendahuluan. Bab ini akan dibagi menjadi sembilan sub bab, yang meliputi sebagai berikut: Alasan penulisan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penulisan, jangkauan penulisan dan sistematika penulisan. Sub bab tersebut masing-masing akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Alasan Pemilihan Judul

Pada saat ini perhatian dunia lebih terfokus pada tragedi kemanusiaan di Palestina, Irak, Libya ataupun di belahan penjuru dunia lainnya. Sedikit sekali masyarakat Internasional yang mengangkat penderitaan etnis Rohingya di Myanmar yang mengalami penindasan atau sebagai Korban Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Penguasa Junta Militer. Padahal etnis Rohingya sudah ada sebelum Myanmar merdeka, yaitu 4 januari 1948.

Kurangnya perhatian masyarakat Internasional, khususnya Indonesia terhadap masalah yang dihadapi etnis Rohingya yang mayoritasnya adalah penduduk Muslim, serta adanya ketutupan pemerintah Myanmar terhadap dunia luar menyebabkan terbatasnya buku-buku atau artikel yang membahas secara rinci tentang etnis Rohingya. Hal ini menyebabkan minimnya masyarakat luas yang

kalangan akademisi maupun awam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat dan memaparkan judul tentang "***FAKTOR-FAKTOR POLITIK DOMESTIK SEBAGAI PENDORONG KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ETNIS ROHINGYA***" dalam skripsi ini.

B. Tujuan Penulisan

Berdasarkan alasan penulisan di atas, maka penulis menentukan tujuan dari penulisan ini adalah :

“Untuk mengetahui dan menggambarkan tentang faktor-faktor politik domestik dibalik ketertarikannya Indonesia memperjuangkan nasib etnis Rohingya.”

C. Latar Belakang Masalah

Setiap negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, baik dengan negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang dijadikan negara dan merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional.¹ Menelaah politik luar negeri Indonesia dalam zaman yang mengalami perubahan dan perkembangan merupakan hal yang

¹ *Perkembangan politik luar negeri Indonesia.* <http://politik.kompasiana.com/2012/03/03/>

Perkembangan politik luar negeri Indonesia. (diakses pada 9 Desember 2012)

menarik. Politik luar negeri suatu negara merupakan substansi dari hubungan internasional yang terselenggara sebagai sarana interaksi antar negara demi pencapaian tujuan nasional.² Perubahan kondisi lingkungan domestik secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi politik luar negeri Indonesia. Dalam mengikuti peraturan dunia, negara Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang pertama kali dicetuskan oleh Drs. Moh Hatta. Bebas berarti menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah Internasional dan terlepas dari kekuatan raksasa dunia. Aktif berarti ikut memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan dunia. Aktif menunjukkan adanya kewajiban pemerintah menunaikan instruksi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³

Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak pernah dapat diatasi sepanjang sejarah manusia. Konflik antarperorangan dan antarperkelompok merupakan bagian dari sejarah hidup manusia. Berbagai macam keinginan seseorang dan tidak pernah terpenuhinya keinginan tersebut dapat berakhir dengan konflik. Masyarakat Dunia Internasional, terutama negara-negara di kawasan ASEAN⁴ dicengangkan oleh kisah yang menyedihkan tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar yang sudah berlangsung sejak lama,

² William D.Coplin, *Introduction to International Politics, A Theoretical Overview*. (terjemahan M.Marbun), CV Sinar Baru, Bandung 1992, hal.32.

³ *Peranan politik luar negeri Indonesia*. <http://iniwebhamdan.wordpress.com/2012/07/12/peranan-politik-luar-negeri-indonesia>.(diakses pada 9 Desember 2012).

⁴ *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu : Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand,

namun solusi atas kasus etnis Rohingya menjadi dilematis dan bahkan tidak ada titik temunya.

Etnis Rohingya adalah penduduk asli Arakan dan merupakan sebuah negara bagian dengan luas 14.200 mil persegi yang terletak di Barat Myanmar, Arakan merupakan daerah pesisir timur teluk Bengali yang bergunung-gunung. Disebelah Utara berbatasan langsung dengan India, negara bagian China dan Distrik Magwe, disebelah Timur berbatasan dengan Pegu, disebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Irrawady dan disebelah Barat ada Negara Bangladesh. Arakan dihuni oleh sekitar 5 (lima) juta penduduk yang terdiri dari dua etnis utama, yaitu Rohingya yang beragama Muslim dan Rakhine/Maghs yang Mayoritas beragama Budha.⁵

Rohingya terus menerus menjadi etnis yang tertindas. Padahal, berdasarkan catatan sejarah sebagian etnis mereka telah berdiam di Arakan sejak abad 7 M atau sebelum negara Myanmar merdeka pada 4 Januari 1948.⁶ Rohingya merupakan sebuah warna yang berbeda bagi masyarakat Myanmar, mayoritas etnis Rohingya beragama Islam dengan jumlah kurang lebih 90% (Sembilan puluh persen) dan hidup di tengah penduduk Myanmar yang beragama Budha. Selain itu dari segi penggunaan bahasa dan bentuk kemiripan wajah, etnis Rohingya tidak memiliki kedekatan dengan penduduk Myanmar pada umumnya melainkan memiliki kedekatan dengan Bangladesh, India maupun Arab.

⁵ *Peta Myanmar*. <https://maps.google.co.id/maps?hl=id&client=&channel=&q=myanmar&gl=> (diakses pada 17 September 2012).

⁶ *Isu Dunia Islam, Selamatkan Muslim Rohingya*. <http://js.ugm.ac.id/isu-dunia-islam/asia/> (diakses pada 8 September 2012).

Rohingya terpinggirkan oleh pemerintahan junta militer.⁷ Banyak sekali perilaku-perilaku keji pemerintah yang berdaulat untuk menunjukkan bahwa pemerintah Myanmar sangat tidak peduli terhadap warga etnis Rohingya. Kekejaman tersebut dimulai sejak tahun 1962 yaitu sejak junta militer berkuasa dan juga semenjak di berlakukannya *Burma Citizen Law* yang disahkan pada tahun 1982. Di dalam undang-undang tersebut diatur siapa saja yang berhak menyangand predikat sebagai warga negara Myanmar. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memperoleh kewarganegaraan melalui warganegara Myanmar asli, warganegara diasosiasikan dan warganegara dinaturalisasikan.⁸

Etnis Rohingya sesungguhnya berasal dari Chittagong, Bangladesh yang bermigrasi ke Myanmar dan meski sudah sampai tingkat empat generasi, pemerintah Myanmar belum mengakui sebagai salah satu dari 135 etnis yang ada di negeri itu.⁹ Bahkan jumlah etnis Rohingya terus berusaha dikurangi dan hanya tersisa sedikit umat Islam Rohingya di selatan Arakan sedangkan di bagian utara Rohingya masih menjadi mayoritas. Tetapi keganjilannya, biksu-biksu di Myanmar yang memiliki peranan penting dalam proses demokratisasi, justru tidak ikut melindungi warga Muslim Rohingya. Sebagian dari mereka bahkan

⁷ *Rohingya terpinggirkan*. <http://www.indies.myphp.net/2012/08/02/index.php/> (diakses pada 2 Agustus 2012).

⁸ *Burma Citizenship Law, 1962*. <http://www.unhcr.org/refword/docid.html>. (diakses pada 10 September 2012).

⁹ *Etnis Rohingya Dianiaya, Indonesia jangan diam saja*. <http://www.gatra.com/internasional/>

menggelar aksi dengan membagikan pamflet anti-Rohingya ke warga. Salah satu pamflet yang dibagikan bertulisan “Rencana untuk membasmi etnis lain.”¹⁰

Para biksu dikabarkan memblokir bantuan kemanusiaan yang diberikan aktivis untuk warga etnis Rohingya. Seorang anggota badan kemanusiaan di Sittwe mengungkap sejumlah biksu ditempatkan dekat kamp pengungsi dan mereka memeriksa setiap orang yang berkunjung, lantaran khawatir akan memberikan bantuan. Para pengamat mengatakan, biksu Myanmar terlihat memblokir bantuan internasional yang ditujukan untuk pengungsi Rohingya. Menurut mereka, bantuan itu sangat biasa.¹¹

Junta Militer merasa bahwa etnis Rohingya bukanlah bagian dari mereka, sehingga etnis Rohingya tidak berhak untuk mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga negara Myanmar. Berdasarkan *Amnesty Internasional*, bentuk-bentuk kekejaman pemerintah junta militer terhadap Muslim Rohingya, antara lain:¹²

1. Penolakan pemberian Kewarganegaraan. Hal ini menyebabkan Etnis Rohingya menjadi bangsa tanpa kewarganegaraan. Walaupun mereka merupakan penduduk asli Arakan. Hal ini, Junta militer memiliki pembenaran untuk mengusir etnis Rohingya dari tanah leluhurnya.

¹⁰ *Gerakan Anti Muslim di Asia Tenggara*. <http://rizkisaputro.wordpress.com/kasus-muslim-rohingya-%E2%80%99/2012/07/25.html>. (diakses pada 10 September 2012).

¹¹ *Biarawan Myanmar disebut turut andil menyebarkan kebencian terhadap Rohingya*. republika.co.id/rangon/2012/07/27.html. (diakses pada 10 September 2012).

¹² *Pembantaian Muslim Rohingya-Myanmar*. <http://sugarfm.blogspot.com/2012/08/pembantaian->

etnis Rohingya tidak memiliki *bargaining position* dan dapat dieksploitasi sewaktu waktu baik tenaganya maupun hartanya.

5. Pembunuhan, penahanan dan penyiksaan, pihak Junta militer telah melakukan kekejaman lainnya yang dilakukan setiap hari.

Di Arakan terdapat kandungan Minyak dan gas bumi yang cukup melimpah. Berapa perusahaan asing seperti Total Prancis, Chevron, Maskapai AS, Petro Cina, Tiongkok Petroleum, Petronas Malaysia dan Perusahaan Thailand saling berebut dan mengincar Arakan yang punya nilai strategis ini. Pada tahun 2008, Perusahaan minyak asal Tiongkok, China National Petroleum Corporation (CNPC) dan Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), mendatangi MoU pembangunan jaringan pipa minyak dan gas di daerah Arakan wilayah Myanmar yang subur dan kaya migas, untuk menyuplai kebutuhan energi China. Jaringan pipa migas CNPC sepanjang 620 mil dialirkan dari Kyaukpyu Port, Arakan kemudian ke Yunan dengan investasi USD 2,5 M. Karena berada di wilayah Arakan, maka Myanmar melakukan pendataan terhadap warga asli negara tersebut.¹⁴

Pada tahun 2008, ada 2 juta muslim Rohingya menempati Arakan, Myanmar Barat. Menurut informasi dari Rohingya Information Centre yang berada di Kuala Lumpur menyatakan bahwa ada sekitar 500.000 Rohingya di Saudi Arabia, 200.000 di Pakistan, 200.000 di Bangladesh, 50.000 di Uni Emirat

¹⁴ Menjelamatkan Muslim Rohingya - <http://siakicantoro.files.wordpress.com/2012/07/25.html>

Arab, dan 15.000 jiwa di Malaysia.¹⁵ Pada tahun 2008, kurang lebih ada 1.200 Etnis Rohingya yang diusir dari Myanmar dan kemudian menuju Thailand. Kehadiran pengungsi di Thailand tersebut, berdampak buruk bagi lingkungan karena untuk bertahan hidup para pengungsi menebang hutan. Thailand juga menghadapi masalah yang sama karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki Thailand untuk menerima pengungsi. Disamping kurangnya sumber daya kehadiran pengungsi Rohingya juga menimbulkan masalah keamanan bagi Thailand yang juga menghadapi etnis dibagian selatan Thailand.¹⁶ Kedatangan mereka yang dianggap tidak wajar menyebabkan otoritas Thailand merasa tidak nyaman dan kemudian mengusir sebagian ke laut sehingga dikenal sebagai manusia perahu.

Kebebasan gerak orang Rohingya sangat terbatas. “United Nations High Commissioner for Refugees” (UNHCR) pernah memulangkan sekitar 200 ribu warga Rohingya di Bangladesh, namun banyak yang kembali kepengungsian. Mereka tidak sanggup bertahan didaerah asalnya selama pelecehan hak-hak kemanusiaan masih terjadi di Myanmar. Perlakuan diskriminatif tersebut membuat mereka memilih untuk meninggalkan Myanmar dan enggan kembali ke Myanmar.¹⁷

¹⁵ Heru susetyo, *Nestapa Rohingya Kian Dilupa*. Sabili, 4 Juni 2009.

¹⁶ *The Nation, Is Asean prepared to pressure Burma over the Rohingya refugees*. <https://democracyforburma.wordpress.com/is-asean-prepares-to-pressure-burma-over-the-rohingya-refugges>. (diakses pada 10 Oktober 2012).

¹⁷ *Burma: Rohingya refugees return to Myanmar*. <http://www.arammah.com/index.php/>

Mereka memilih mengungsi di negara-negara lain. Indonesia menjadi salah satu tujuan mereka. Indonesia sebuah negara dengan luas wilayah 1,904,569 km².¹⁸ Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah 237.556.363 jiwa,¹⁹ merupakan sebuah negara yang padat penduduk, meskipun demikian Indonesia merupakan salah satu negara tujuan yang paling diminati oleh para pengungsi tersebut meskipun hanya sebagai tempat transit saja.

Sebagian dari pengungsi ada yang sampai di laut Andaman Aceh. Menurut data tahun 2009 mengatakan bahwa jumlah pengungsi etnis Rohingya di Indonesia ada 391 orang. Manusia perahu Rohingya yang tiba diperairan Sumatera melalui dua gelombang, yaitu pada 7 Januari 2009 (193 orang, ditampung sementara di Pulau Weh, Sabang, NAD) dan 3 Februari 2009 (198 orang, ditampung sementara di Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, NAD). 22 orang yang berhasil diselamatkan oleh Indonesia telah meninggal dunia karena haus dan lapar dan 300 orang telah tenggelam.²⁰

Hubungan antara pemerintah Indonesia dan Myanmar cukup dekat, baik secara bilateral maupun dengan negara kawasan. Karena itu pula, kepedulian yang ditunjukkan Indonesia lewat berbagai macam bantuan dari masyarakatnya diharapkan bisa diterima tanpa mencederai hubungan persahabatan kedua negara.

¹⁸ luas wilayah Indonesia. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>. (diakses pada 2 Oktober 2010).

¹⁹ Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=10/2011/03/04. (diakses pada 2 Oktober).

²⁰ Pengungsi Rohingya di Aceh: Hampir 400 Pengungsi Segera Dideportasi. <http://nasional.vivanews.com/news/read/2009/02/07/27948-pengungsi-rohingya-di-aceh-hampir-400-pengung>

Apalagi jika berkaca pada konflik yang pernah terjadi di Indonesia, pemerintah setempat dipastikan akan lebih berhati-hati dengan bantuan asing yang datang ke Myanmar.

Deplu yang dibantu oleh organisasi kemanusiaan yaitu organisasi internasional untuk migrasi (IOM) membuat penelitian untuk mengetahui kedatangan manusia-manusia perahu tersebut. Dari penelitian tersebut di peroleh temuan awal yang menyatakan bahwa motif utama dari kedatangan manusia perahu adalah *economic migrant*. Kedatangan manusia perahu tersebut adalah dalam rangka memperoleh penghidupan yang lebih baik sebab di negara asal mereka, etnis Rohingya tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki harkat hidupnya.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah Indonesia tercermin dari sikap perlakuan yang baik pemerintah Indonesia terhadap etnis Rohingya. Pemerintah Indonesia memberikan tanggap darurat berupa pemberian bantuan kemanusiaan dalam bentuk *shelter* (perlindungan), makanan, minuman dan obat-obatan untuk pengungsi etnis Rohingya yang berhasil mendarat di wilayah Indonesia. Para pengungsi tersebut juga di perbolehkan untuk tinggal di Indonesia sampai memperoleh penyelesaian yang konfrehensif.

Pada November 2010, Myanmar menggelar pemilu parlemen dan ini adalah pesta demokrasi pertama sejak 20 tahun terakhir. Meski bersedia menggelar pemilu, akan tetapi rezim militer menjatahkan seperempat kursi

dalam pemilu. Pemilu tersebut tidak membuat etnis ini bebas dan diakui. Perekonomian etnis ini masih berantakan, kebanyakan penduduknya miskin, dan tidak ada sistem kesehatan serta pendidikan yang berfungsi. Pelanggaran hak asasi manusia sudah merupakan keseharian. Kabar pembunuhan, pembakaran, penjarahan, pemerkosaan serta penangkapan Muslim Rohingya semakin nyaring terdengar. Kekerasan kejam tersebut dilakukan oleh ekstrimis Budha dan pasukan pemerintah. Ribuan jiwa Muslim tak berdosa gugur dalam kekerasan.

Pada Februari 2011, Kepolisian Indonesia telah menangani 129 warga Rohingya yang ditemukan dalam sebuah perahu dekat perairan Krueng Raya, Nangroe Aceh Darusalam, perlakuan diskriminatif tersebut membuat mereka memilih untuk meninggalkan Myanmar dan mengungsi di negara lain.

Menurut laporan *The New Light of Myanmar*, sebuah koran yang terbit di negara Myanmar tertanggal 5 Juni 2012, muncul konflik Rohingya yang memuncak, bermula dari sebuah pembunuhan seorang gadis Budha pada 28 Mei 2012. Ma Thida Htwe hendak pulang ke rumah setelah seharian bekerja sebagai penjahit. Sepulang bekerja, ia ditikam oleh orang yang tak dikenal, mereka adalah Htet Htet Rawshi, Rawphi dan Khochi, ketiganya adalah Muslim bengali. Pada 4 Juni 2012, beredar foto-foto hasil penyelidikan tim forensik bahwa sebelum dibunuh, ternyata korban sempat diperkosa. Foto-foto tersebut semakin menambah kemarahan warga yang beragama Budha. Pagi hari, sekelompok orang yang terkumpul dalam Wunthanu Rakhita Association, Taungup, membagi-

hasil penyelidikan yang berisi foto-foto tadi. Mereka juga menyerukan bahwa

Muslim telah membunuh gadis Arakan secara sadis. Tepatnya pada sore hari, tersebar kabar bahwa ada mobil yang berisikan orang Muslim dalam sebuah bus yang melintas, sekitar tiga ratus warga setempat yang telah terprovokasi menghadang laju bus. Mereka menurunkan penumpang bus tersebut, karena menurutnya didalam bus terdapat saudara dekat dari salah satu pemuda pembunuh gadis Budha. Selanjutnya, mereka membunuh penumpang yang beragama Islam. Sepuluh orang terbunuh di tempat dalam kejadian ini.²¹

Upaya pemerintah Indonesia secara multilateral dan regional aktif ikut membahas permasalahan etnis Rohingya, seperti didalam organisasi-organisasi kemanusiaan: UNHCR, IOM dan JVT. Diplomasi mengangkat isu Rohingya di KTT ASEAN, Forum *Bali process* dan KTT OKI yang berlangsung di Mekah, Saudi Arabia tanggal 14-15 Agustus 2012 juga sebagaimana diketahui, atas inisiatif Indonesia dan beberapa Negara ASEAN, telah mendorong pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik, Myanmar termasuk akan bermitra dengan ASEAN dalam mendorong penyelesaian konflik.²² Indonesia membahas kekerasan yang dialami umat Islam Rohingya, Myanmar. Menteri Luar Negeri Indonesia (Marty Natalegawa) menegaskan, bantuan terhadap etnis Rohingya tidak cukup hanya dengan pernyataan kecewa, atau mengutuk.

Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya kemudian menyelesaikan, memberikan status, atau menyalurkan para pengungsi Rohingya

²¹ *Kisah lengkap pembantaian 10 Orang Etnis Muslim Rohingya.* <http://demokrasiindonesia.wordpress.com/news/read/2012/07/12/kisah-lengkap-pembantaian-10-orang-etnis-muslim-rohingya>. (diakses pada 3 Oktober 2012).

²² *Denlu berkah diri.* <http://www.denlu.go.id/pages/aboutUs.aspx?IDP=4&I=id=2009/12/13>

kepada pihak ketiga.²³ Marty menghimbau agar konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tidak dilokalisir kepada isu-isu SARA. Jangan sampai menyebabkan ketidakharmonisan di kalangan umat beragama di Indonesia.²⁴ Indonesia peduli juga bukan hanya karena etnis Rohingya itu Muslim tetapi juga karena asas kemanusiaan etnis Rohingya ternodai.

Ketika banyak negara menolak kedatangan para pengungsi dan pencari suaka etnis Rohingya di negara Asia Tenggara, Indonesia menerima kedatangan mereka. Menlu RI mengatakan dari data yang di dapat dari Ditjen Imigrasi melalui www.inilah.com 2 Agustus 2012, saat ini terdapat 324 warga Rohingya yang berada di Indonesia. Setidaknya ada 3 langkah yang dilakukan Indonesia. *Pertama*, melakukan diplomasi di dunia internasional untuk menekan pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan semua tindakan kekerasan. *Kedua*, memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung kepada para pengungsi. *Ketiga*, menampung dan menerima para pengungsi etnis Rohingya di Indonesia.²⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

²³ *Indonesia dan harapan penyelesaian kasus Rohingya.* <http://oase.kompas.com/read/2012/08/06/20460016/indonesia.dan.harapan.penyelesaian.kasus.rohingya>. Kompas: Sabtu, 14 September 2012.

²⁴ *Marty Natalegawa: Bantuan untuk Rohingya Tidak Cukup Hanya Pernyataan Mengutuk.* <http://www.rmol.co/news.php?id=2012/08/1/73455>. (diakses pada 14 September 2012).

²⁵ *Indonesia punya posisi strategis tekan Myanmar.* <http://www.rmol.co/news/read/7/2012/07/2512211>. (diakses pada 2 Agustus 2012).

“faktor politik domestik apa saja yang mendorong politik luar negeri Indonesia memperjuangkan nasib etnis Rohingya?”

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisa faktor politik domestik yang mendorong politik luar negeri Indonesia memperjuangkan nasib etnis Rohingya adalah dengan menggunakan *Teori Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri* yang dikembangkan oleh William D. Coplin.²⁶

Perlu digaris bawahi bahwa teori adalah merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yang mempunyai arti memperhatikan atau melihat. Menurut Mochtar Mas'ood, teori adalah bentuk pernyataan yang dipakai untuk menjawab pertanyaan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis, dimana teori berupa sebuah kumpulan generalisasi didalamnya, sehingga dapat menjelaskan suatu fenomena secara ilmiah.²⁷

Teori Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri

Dalam perspektif Realis, Kebijakan luar negeri adalah tujuan nasional suatu negara yang dipengaruhi oleh perilaku Internasional seperti keamanan, kapasitas militer dan aliansi negara.²⁸ Kebijakan politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan

²⁶ William D.Coplin, *Pengantar Politik Internasional, Suatu Telaah Teoritis*, Edisi Kedua (terjemahan M.Marbun), CV Sinar Baru, Bandung 1992.

²⁷ Mochtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3S, Jakarta, 1990 hal.185.

²⁸ M. J. M. H. van der Kroep, *Politics Among Nations*, New York: Alfred Knopf

dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional.²⁹ K. J. Holsti, Kebijakan politik luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain.³⁰ Kajian mengenai teori pembuatan keputusan luar negeri menjelaskan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai hasil berbagai alternatif yang ada dengan keuntungan sebesar-besarnya atau kerugian sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil).

Dalam perspektif Liberal, yang akan dijadikan dalam penelitian ini, Kebijakan politik luar negeri cenderung dimaknai sebagai sebuah identitas yang menjadi karakteristik pembeda negara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Setiap negara satu dengan negara yang lainnya memiliki kondisi politik dalam negeri yang berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan William D. Coplin, Kebijakan luar negeri adalah kondisi politik dalam negeri merupakan faktor yang membawa dampak besar bagi politik luar negeri. Sebelum mengadakan serangkaian tindakan dalam hubungan luar negerinya, suatu negara terlebih dahulu harus menentukan pola politik luar negerinya berdasarkan atas kebutuhan nasional sehingga kepentingan nasional berperan sebagai kontrol dalam setiap pelaksanaan politik luar negerinya. Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya.

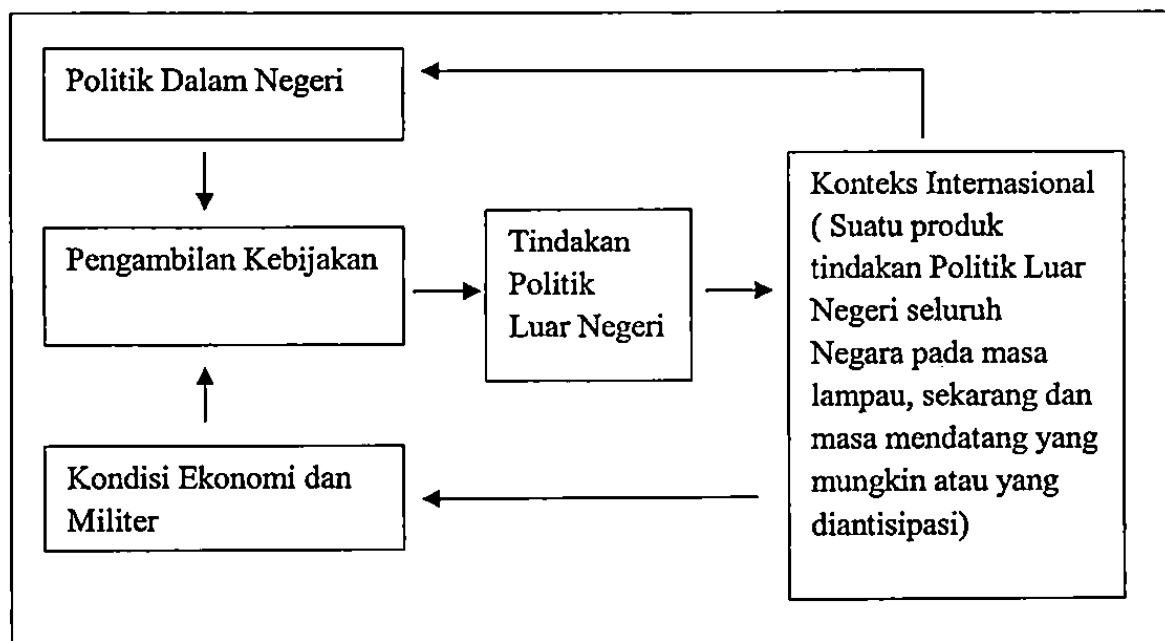
²⁹ Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Dictionary*, Rienert an Wistone inc USA 1969, terjemahan Wawan Juanda Abardin, hal 5.

³⁰ K. J. Holsti, *The Theory of Foreign Policy*, Columbia University Press, New York, 1963, diterjemahkan M. Tahir

Politik Internasional merupakan interaksi dari politik luar negeri, yaitu suatu kajian pokok (core subject) dalam kajian hubungan Internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan dan kekuasaan, politik internasional bisa dipandang sebagai output dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Tiga pertimbangan tersebut, yakni: (1) Kondisi politik dalam negeri (2) Kondisi atau kemampuan ekonomi dan militer (3) Konteks Internasional, yaitu posisi khusus negara tersebut dalam hubungannya dengan negara lain dalam system internasional itu.³¹

Menurut William D. Coplin, gambar dibawah ini dapat menggambarkan bagaimana faktor-faktor yang telah disebutkan di atas saling berinteraksi sehingga menghasilkan tindakan politik luar negeri.

Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri oleh William D. Coplin.



³¹ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional, Suatu Telaah Teoritis*, Edisi Kedua

Menurut gambar diatas, politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh: kondisi politik dalam negeri, kondisi atau kemampuan ekonomi dan militer serta konteks internasional. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan para aktor-aktor dalam pengambilan keputusan dimana terdapat kepentingan, baik itu murni kepentingan negara atau kepentingan pribadi dari pengambil keputusan:

1. Faktor Politik dalam negeri

Menurut William D. Coplin, peran politik dalam negeri yang turut memberikan pengaruh dalam penyusunan politik luar negeri atau disebut dengan *policy influencers* dibedakan menjadi empat tipe, yaitu: *partisan*, birokratis, kepentingan dan *mass influencers*.³²

a. *Partisan influencers*

Partisan influencers ini bertujuan untuk menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan, yaitu tuntutan kepada para pengambil keputusan yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah. *Influencers* ini berupaya untuk mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan para penguasa dan dengan menyediakan personel-personel yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan.³³

Influencers ini dipandang sebagai informasi dua arah dan

menyampaikan seluruh di antara para pengambil keputusan resmi dan

anggota masyarakat. *Partisan influencers* biasanya lebih banyak memfokuskan pada kebijakan dalam negeri, namun juga tidak mengabaikan kebijakan luar negeri terutama apabila kebijakan luar negeri tersebut memberi pengaruh dalam negeri.

b. Bureaucratic influencers (birokrat yang mempengaruhi)

Istilah *bureaucratic influencers* ini digunakan untuk menunjukkan kepada individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun, serta melaksanakan kebijakan.³⁴

Kelompok-kelompok birokratis ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan keputusan karena kelompok-kelompok ini menyalurkan informasi kepada pengambil keputusan dan kemudian melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan.³⁵

c. Interest influencers (kepentingan yang mempengaruhi)

Interest influencers terdiri atas sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang belum cukup luas untuk bisa menjadi dasar bagi aktivitas kelompok partai, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber untuk mendapat dukungan dari *policy influencers* atau pengambil keputusan yang lain.

Keuntungan kepentingan ini bersifat ekonomis karena orang-orang sering

dimotivasi untuk melakukan tindakan kolektif melalui persamaan kepentingan ekonomi.³⁶

Kepentingan-kepentingan yang bersifat non-ekonomis juga bisa digunakan sebagai dasar tindakan kolektif, terutama apabila ada ikatan-ikatan etnis atau geografis di antara mereka. *Interest influencers* merupakan faktor yang penting dalam penyusunan politik luar negeri, karena mereka mempengaruhi kompleksitas proses politik dalam negeri.³⁷

d. *Mass Influencers*

Opini publik atau *mass influencers* lebih mengacu pada opini yang dimiliki oleh rakyat yang dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan pada saat menyusun politik luar negeri. Opini publik digunakan oleh pengambil keputusan dan *policy influencers* lainnya, seolah-olah sekedar suatu kekuatan yang mengarahkan para pengambil keputusan. Para pejabat menggunakan opini publik untuk merasionalisasi tindakan-tindakan politik luar negeri, bukan untuk membentuk kebijakan.³⁸

2. Faktor Ekonomi dan Militer

Pengambil keputusan luar negeri juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor ekonomi dan militer, serta memperhatikan kelemahan negara dalam penyusunan politik luar negeri. Dalam rangka mengambil kebijakan luar negeri haruslah melihat dahulu kekuatan

³⁶ William D. Coplin. *Op. Cit.* Hal. 87

³⁷ William D. Coplin. *Op. Cit.* Hal. 88

³⁸ William D. Coplin. *Op. Cit.* Hal. 88

ekonomi dan militer sebuah negara, karena ekonomi dan militer merupakan isu yang sangat penting bagi suatu negara untuk berdiplomasi dengan baik. Para pembuat keputusan luar negeri harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya, yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer.³⁹

Secara historis, faktor-faktor ekonomi dan militer saling berkaitan dengan pembentukan politik luar negeri suatu negara. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi dan militer acapkali digunakan suatu negara dalam proses tawar-menawar dalam politik internasional. Terlebih dewasa ini kekuatan militer dan ekonomi menjadi nilai lebih guna meraih citra bagi sebuah negara di mata internasional.

3. Faktor Konteks Internasional

Secara tradisional para analis telah menekankan bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antar negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem itu, menentukan bagaimana negara akan berperilaku.⁴⁰ Hans J. Morgenthau berargumentasi bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif. Kepentingan nasional ini adalah faktor penentu dalam politik luar negeri suatu negara.⁴¹ Kondisi

³⁹ William D. Coplin. *Op.Cit.* Hal. 110

⁴⁰ William D. Coplin. *Op.Cit.* Hal. 165

⁴¹ William D. Coplin. *Op.Cit.* Hal. 166

internasional sebagai suatu perangkat faktor yang mempengaruhi aktivitas politik luar negeri negara.

Ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis, dan politis. Geografi masih memainkan peran politik luar negeri yang penting meskipun bukan peran terpenting seperti di masa lalu, beberapa kondisi geografis masih merupakan bagian yang konstan dari keputusan politik luar negeri.⁴² Selain faktor geografis, faktor hubungan ekonomi juga merupakan bagian yang penting dalam konteks internasional. Baik arus barang dan jasa maupun arus modal membuat sebagian negara-negara tertentu bergantung terhadap negara lainnya. Yang terakhir adalah hubungan politik dengan negara-negara lain dalam lingkungannya sangat berperan dalam keputusan-keputusan politik luar negeri suatu negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengambilan kebijakan politik luar negeri suatu negara merupakan sebuah kompleksitas yang turut mempertimbangkan berbagai faktor di dalamnya. Tetapi dalam penelitian ini fokus kepada politik dalam negeri Indonesia yaitu adanya *policy influencer*. Adapun pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap nasib etnis Rohingya tidaklah lepas dari *policy influencer* yang berada di sekeliling para pengambil kebijakan. Kondisi politik dalam

porsi *policy influencer* untuk semakin mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Sebab didalam pemerintahan yang demokratis *policy influencer* sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Policy Influencer mempengaruhi kebijakan Luar negeri Indonesia dengan melakukan berbagai aktivitas-aktivitas antara lain: *Pertama*, demonstrasi yaitu sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum dan biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat atau menentang suatu kebijakan dan demonstrasi adalah ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat.⁴³ *Kedua*, liputan media masa yang merupakan institusi yang difungsikan untuk mengembangkan kebebasan berpendapat dan menyebarkan informasi kesegala arah kepada publik dan institusi lainnya.⁴⁴

Untuk konteks Indonesia, bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yaitu berjumlah 182,570,000 orang.⁴⁵ Jumlah ini pula yang mengukuhkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di Asia Tenggara, dan Rohingya sendiri mayoritas Islam. Kondisi ini tentu saja berbanding lurus dengan para pengambil keputusan, yaitu banyaknya partai-partai politik Islam, organisasi masyarakat Islam, organisasi semi pemerintahan Islam dan pergerakan

⁴³ Demonstrasi. <http://id.wikipedia.org/demonstrasi>. (diakses pada 29 Oktober 2012).

⁴⁴ Media. <http://id.wikipedia.org/wiki/media>. (diakses pada 29 Oktober 2012).

⁴⁵ 10 negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. <http://ramadhaniricky.blogspot.com/2010/02/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia.html>. (diakses pada 11 September 2012).

mahasiswa yang bernafaskan Islam di Indonesia dan tokoh-tokoh tersebut memungkinkan turut mendukung perjuangan untuk setiap kebijakan yang akan diambil oleh para pembuat keputusan dalam kebijakan luar negerinya. Karena setiap keputusan yang diambil dan dipengaruhi oleh para pengambil kebijakan merupakan wujud dari kepentingan nasional negaranya.

F. Hipotesa

Berdasarkan paparan tersebut maka dapat dibuat sebuah kesimpulan sementara bahwa kondisi politik dalam negeri (domestik) Indonesia yang demokratis dan keberadaan berbagai "*policy influencers*" domestik yg melakukan desakan terhadap pemerintah Indonesia—khususnya dari beberapa partai politik Islam, organisasi masyarakat Islam, organisasi semi pemerintah Islam dan pergerakan mahasiswa Islam—menyebabkan pemerintah terdorong untuk memperjuangkan muslim etnis Rohingya.

G. Metode Penulisan

Metode dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara mengetahui dan menggambarkan fenomena berdasarkan hasil pengamatan data yang diperoleh. Dalam penulisan ini, Penulis berusaha menggambarkan Faktor-faktor domestik Indonesia sebagai pendorong Kebijakan Luar Negeri terhadap etnis Rohingya

Fokus obyek penelitian ini dipusatkan mengenai Myanmar dan masalah etnis Rohingya, Upaya Indonesia untuk memperjuangkan nasib etnis Rohingya dan faktor politik domestik apa saja yang mendorong politik luar negeri Indonesia memperjuangkan nasib etnis Rohingya.

Fokus waktu penelitian dimulai sejak Desember 2008 karena pada saat itu Myanmar masih saja melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas, pemerintah juga melakukan pengusiran besar-besaran dan sejak awal 2009 banyak etnis Rohingya menjadikan Indonesia tempat untuk pengungsian sementara dan Indonesia mulai gencar menyuarakan nasib etnis Rohingya, hingga 2012.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul ***“FAKTOR-FAKTOR POLITIK DOMESTIK SEBAGAI PENDORONG KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ETNIS ROHINGYA”*** disusun secara sistematis menjadi Lima Bab, yaitu:

Bab 1, pada *Bab pertama* akan memaparkan mengenai bab pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul agar kita mengetahui arti dari judul yang disajikan. Kemudian tujuan penelitian, setelah itu latar belakang masalah yang berisikan asal muasal permasalahan agar kita memahaminya secara jelas. Disusul dengan rumusan masalah yang berisi kesimpulan tentang permasalahan yang diangkat. Untuk membedah permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya maka diambilah sebuah teori yang akan disajikan dalam kerangka dasar pemikiran, sehingga dapat ditarik sebuah hipotesis. Setelah itu metode penulisan

agar dapat mengetahui bagaimana penulis mendapat data yang akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan ini. Selanjutnya batasan penulisan ini dan untuk mempersempit fokus penelitian menjadi lebih terarah dan tidak terlalu meluas. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II, pada *Bab kedua* akan memaparkan mengenai Myanmar dan Masalah etnis Rohingya, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu: mengenai politik ekonomi Myanmar, penindasan dan masalah pengungsi etnis Rohingya.

Bab III, pada *Bab ketiga* akan memaparkan mengenai upaya Indonesia untuk memperjuangkan nasib etnis Rohingya, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu: Kerjasama dengan Organisasi-organisasi kemanusiaan dan Diplomasi mengangkat Isu etnis Rohingya.

Bab IV, pada *Bab Keempat* akan memaparkan mengenai faktor politik domestik apa sajakah yang mendorong politik luar negeri Indonesia memperjuangkan nasib etnis Rohingya yang terdiri dari dua empat sub bab, yaitu: Konteks domestik: Indonesia sebagai negara demokrasi, Pengaruh politik domestik: *policy influencers*, Artikulasi masyarakat muslim dan Implikasi bagi pengambilan kebijakan politik luar negeri.

Bab V, pada *Bab kelima* merupakan akhir dari pembahasan yang akan memaparkan mengenai Kesimpulan dari apa yang telah dikaji dari bab-bab